

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini dipaparkan penelitian terdahulu terkait indikator dan hasil yang beragam yang menjelaskan mengenai *Tax Avoidance* perusahaan, sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

##### 1. **Dy Retta M. dan Mienati Somya L. (2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh Dy Retta dan Mienati Somya (2016) bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014. Penentuan sampel yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda. Berdasarkan dari hasil analisis dengan menggunakan sampel sebanyak 147 yang terdiri dari 49 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dapat disimpulkan bahwa kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu, yaitu komisaris independen dan kepemilikan institusional sama dengan variabel yang sekarang diteliti.
- b. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama, yaitu menggunakan metode regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan tahun penelitian dengan rentan waktu 2012-2016, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian dengan rentan waktu 2012-2014.
- b. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Variabel independen keseluruhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

## **2. Ida Ayu Trisna Y. A. dan Ketut Alit S. (2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Ketut Alit (2016) bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan pada

penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel sejumlah 159 untuk dijadikan amatan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit, preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sama menggunakan variabel komite audit dan komisaris independen.
- b. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dengan penelitian terdahulu sama, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Tahun amatan pada penelitian ini menggunakan tahun 2012-2016, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan tahun 2011-2013.
- b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan.
- c. Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia. Pada

penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Putu Rista D. dan IGK Agung U. (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Rista dan IGK Agung (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian Putu Rista dan IGK Agung (2016) menggunakan metode *nonprobability sampling* dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 yang berjumlah 44 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama yaitu komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen.
- b. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sama yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Tahun amatan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan periode 2012-2014, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 2012-2016.
- c. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan pada penelitian terdahulu, menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit.

#### **4. Sabar Warsini (2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh Sabar Warsini (2016) bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang peran praktik *Corporate Governance* dalam tindakan penghindaran pajak. *Corporate Governance* tingkat perusahaan ini diukur dengan kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai mekanisme monitoring eksternal. Sesuai dengan kriteria sampel diperoleh sampel akhir sebanyak 2453 tahun perusahaan (*firm years*). Data keuangan, kepemilikan, dan auditor diperoleh dari database Data stream Thomson Reuters. Sedangkan data *score* CG Negara diperoleh dari hasil survei SLCA. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah persamaan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Serta, di tingkat Negara terdapat bukti bahwa perusahaan yang berkedudukan di Negara-negara yang menjalankan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dan tidak melakukan penghindaran pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel yang diteliti disini sama menggunakan kepemilikan institusional dan kualitas audit.
- b. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama menggunakan teknik analisis metode regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2010-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2016.
- b. Penelitian terdahulu meneliti perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek lima Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Phillipina. Sedangkan pada penelitian ini meneliti perusahaan pertambangan *go public* yang terdaftar di BEI.

##### **5. Armstrong *et al.* (2015)**

Penelitian yang dilakukan Armstrong *et al.* bertujuan untuk meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan, insentif manajerial, dan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan hasil yang

beragam dalam penelitian sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di Compustat dengan periode 2007-2011. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi kuantil. Hasil dari regresi kuantil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara dewan independen dan kecanggihan *financial* pada tingkat penghindaran pajak yang rendah, tetapi memiliki hubungan negatif pada penghindaran pajak dengan tingkat yang lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola memiliki hubungan yang lebih kuat dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih ekstrim. Pada insentif manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan *Tax Avoidance*.
- b. Variabel independen yang digunakan menggunakan *Corporate Governance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Populasi dalam penelitian terdahulu menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di Compustat periode 2007-2011. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

## **6. Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu dan Supriyadi (2015) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari *Corporate Social Responsibility*

(CSR), profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Populasi perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan hasil sebanyak 24 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian dari penelitian tersebut menyatakan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama, yaitu menggunakan teknik regresi linear berganda.
- b. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama menggunakan penghindaran pajak perusahaan (*Tax Avoidance*). Dan variabel independen yang digunakan sama menggunakan variabel komisaris independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2016. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan sampel penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2013.
- b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite



audit, dan kualitas audit. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan CSR, ROA, *leverage*, dan komisaris independen.

#### **7. Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015) ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut menggunakan sampel sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2013. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel adalah 22 perusahaan dengan pengamatan selama 4 tahun dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis pada penelitian tersebut menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut adalah bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama, yaitu menggunakan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional.
- b. Teknik analisis data dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama, yaitu dengan menggunakan teknik regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *return on assets*.
- b. Populasi sampel dalam penelitian terdahulu menggunakan data sektor industri properti dan real estate. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
- c. Periode penelitian terdahulu menggunakan periode 2010-2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode penelitian 2012-2016.

#### **8. I Gusti Ayu C. M. dan Ketut Alit S. (2014)**

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Corporate Governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun pengamatan 2008-2012. Populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti akan dikeluarkan dari sampel. Dalam menguji hipotesis menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit yang

merupakan proksi dari *Corporate Governance* dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan. Selanjutnya, risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini sama dengan variabel independen penelitian terdahulu, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.
- b. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu sama dengan penelitian sekarang, yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah :

- a. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
- b. Tahun pengamatan yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah periode 2008-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun pengamatan periode 2012-2016.

## 9. Kesit Bambang Prakosa (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang (2014) bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Variabel kontrol dalam penelitian tersebut antara lain *leverage*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal. Populasi sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012 yang berjumlah 136 perusahaan. Setelah diseleksi dengan metode *purposive sampling* maka diperoleh 58 perusahaan per tahun. Sehingga perusahaan yang diteliti sebanyak 232 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa yang berpengaruh negatif signifikan antara lain, profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan komisaris independen. Sedangkan *leverage*, komite audit, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Teknik analisis data dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama, yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda.
- b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu menggunakan variabel komisaris independen dan komite audit.
- c. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sama dengan penelitian terdahulu yang menggunakan metode *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Populasi sampel penelitian terdahulu menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan data dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

#### **10. Utkir Kholbadalov (2012)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya utang, serta apakah tingkat moderat kepemilikan institusional hubungan ini. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia selama tahun 2005-2009. Variabel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penghindaran pajak, biaya utang, dan kepemilikan institusional. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan indeks utama berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari kepemilikan institusional pada hubungan ini. Hal ini berarti bahwa tingkat kepemilikan institusional tidak berdampak pada hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, terlepas dari kepemilikan institusional yang tinggi dan rendah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama menggunakan penghindaran pajak dan kepemilikan institusional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Pada penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Sedangkan, pada penelitian terdahulu menggunakan 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2005-2009.

## **2.2 Landasan Teori**

Landasan teori memuat teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori ini digunakan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang muncul terkait dengan variabel yang diteliti. Teori-teori yang mendukung penelitian ini antara lain :

### **2.2.1 *Agency Theory***

Terdapat hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*), bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan dalam keagenan mengakibatkan dua permasalahan yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai posisi keuangan yang sebenarnya, posisi operasi entitas dan pemilik, serta menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena perbedaan tujuan antara manajemen dengan kepentingan pemilik.

Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan dengan pemegang saham untuk diberi wewenang dalam membuat keputusan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya potensi konflik kepentingan yang dikenal dengan teori keagenan (*agency theory*) dan juga munculnya biaya-biaya yang seharusnya tidak

perlu terjadi dalam perusahaan bila dikelola oleh pemilik, yang biasanya disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan ini merupakan bentuk mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, antara lain : (1) biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh *principal*, (2) biaya mengikat yang dikeluarkan oleh *agent*, dan (3) kerugian sebagai pengurang kekayaan *principal* atau pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini adalah timbulnya konflik kepentingan dari teori agensi yang akan mempengaruhi tingkat agresifitas pajak. Di satu sisi, pihak manajemen menginginkan keuntungan yang tinggi, tetapi disisi lain pemilik saham menginginkan keuntungan yang rendah agar dapat mengurangi beban pajak. Sebagai pengelola, pihak manajemen berusaha untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut dengan cara tetap menjaga dan memaksimalkan nilai perusahaan dan dengan meminimalisir kewajiban pajak perusahaan melalui praktik *Tax Avoidance*.

### **2.2.2 Tax Avoidance**

Upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memperoleh laba melalui penerapan manajemen pajak dengan menggunakan metode penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance* yang dilakukan disini, yaitu dengan mengurangi jumlah pajak dengan cara tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dyreng, et al., (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari

masih terlindung dalam peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* sendiri dapat dilakukan dengan cara memperkecil objek pajak yang dikenakan sehingga tarif beban pajak lebih kecil dari yang sebenarnya. Hal ini menjadikan beban pajak dari wajib pajak menjadi lebih rendah.

Usaha wajib pajak dalam melakukan *Tax Avoidance* dengan tata cara yang diperkenankan dalam Undang-Undang pajak, yaitu :

- a. Melakukan pemindahan subjek pajak atau objek pajak ke Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah.
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas bukti *transfer pricing* dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis.

Wajib pajak termotivasi dalam melakukan *Tax Avoidance* karena beban pajak yang dibayarkan terlalu tinggi, ringannya sanksi sehingga menyebabkan banyaknya wajib pajak yang memungkinkan untuk melakukan tindakan pelanggaran, serta semakin kecil kemungkinan untuk terdeteksi maka akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak dalam melakukan pelanggaran tersebut. Sering terjadinya *Tax Avoidance* kemungkinan disebabkan oleh undang-undang dan aturan mengenai perpajakan yang dapat memicu adanya persepsi yang



berbeda dan beda penafsiran karena disebabkan oleh kompleksnya hukum pajak yang berlaku. Penyebab dari kompleksnya hukum pajak tersebut adalah ketika dilihat dari sudut pandang fiskus (aparatur pajak) bahwa sebenarnya mereka tidak menginginkan peraturan mengenai pajak dan perundangan tentang pajak disalahgunakan untuk kepentingan wajib pajak sendiri sehingga mampu merugikan negara. Sedangkan, jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak sendiri, bahwa upaya yang mereka lakukan dalam menghindari pajak tersebut tidak melanggar perundang-undangan sehingga bersifat legal.

*Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* sangatlah berbeda. *Tax Evasion* sendiri merupakan usaha penggelapan pajak agar terhindar dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk merekayasa suatu objek maupun transaksi. Berbeda dengan *Tax Evasion*, *Tax Avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakukan suatu perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajaknya. Dalam mengukur *Tax Avoidance* terdapat dua belas cara yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Rincian pengukuran tersebut dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**PENGUKURAN TAX AVOIDANCE**

<b>Tahun</b>	<b>Cara Perhitungan</b>
GAAP ETR	<i>Worldwide total income tax expense</i>
	<i>Worldwide total pre – tax accounting income</i>
Current ETR	<i>Worldwide current income tax expense</i>
	<i>Worldwide total pre – tax accounting income</i>

<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes expense})}{\sum(\text{Worldwide total pre – tax accounting income})}$
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR - GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression :</i> $\text{ETR Differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Controls} + e$
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered Tax Expenses/U.S.STR</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	$\text{Residual From BTD/TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed Amount Post-FIN48</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for Firms Accused of Engaging in a Tax Shelter</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated Marginal Tax Rate</i>

*Tax Avoidance* disini diukur dengan CETR. CETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan secara efektif. Penelitian ini menggunakan CETR (*Cah Effective Tax Rate*) untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Jika diketahui nilai CETR yang semakin tinggi, maka perusahaan tersebut dinilai semakin rendah dalam melakukan *Tax Avoidance*. Dan sebaliknya, jika nilai CETR semakin rendah, maka tingkat *Tax Avoidance* dinilai

semakin tinggi. Sehingga *Tax Avoidance* dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pajak Yang Dibayarkan Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.2.3 *Corporate Governance*

*Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja suatu perusahaan. Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai mekanisme yang digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan point tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat tanpa menghasilkan indikasi yang buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam mengelola, mengawasi, dan mengendalikan pihak yang berkepentingan untuk tercapainya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu :

### 1. Transparansi (*Transparency*)

*Transparency* disini berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan para investor. Maka dari itu, informasi dari perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, tepat, akurat, dan dapat diperbandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip keterbukaan ini dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi secara relevan dan bersifat material bagi perusahaan untuk dijadikan pengambilan keputusan yang baik maupun dalam pengungkapan informasi.

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas diperlukan untuk menghasilkan solusi dalam masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Akuntabilitas sendiri merupakan kejelasan fungsi, struktur, system, dan pertanggungjawaban oleh perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan maksimal dan efektif. Salah satu implementasi dari akuntabilitas adalah dengan praktik audit internal yang baik dan efektif.

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka panjang. Dengan penerapan prinsip ini

diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kegiatan operasional yang seringkali dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Independensi atau kemandirian adalah prinsip yang berperan dalam menciptakan profesionalisme dalam perusahaan tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kesenjajaran dan Kewajaran (*Fairness*)

Kesenjajaran dan kewajaran disini dapat didefinisikan sebagai perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan pihak lainnya sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip ini diharapkan dapat memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemegang saham tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan perundang-undangan yang tegas, konsisten, serta dapat diterapkan secara efektif dalam kesehariannya dalam perusahaan.

*Corporate Governance Indonesia* menyebutkan bahwa terdapat manfaat dari *Corporate Governance*, antara lain :

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik serta dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.
2. Dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia.

3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

#### 2.2.4 Kepemilikan Institusional

Mekanisme *Corporate Governance* salah satunya adalah kepemilikan institusional (*Institutional Ownership*) yang merupakan salah satu bentuk mekanisme monitoring eksternal (Sabar Warsini, 2016). Disini keberadaan kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan juga pemegang saham. Bisa dikatakan bahwa investor institusional memiliki informasi yang lebih unggul dibandingkan dengan investor non-institusional. Investor institusional juga mempunyai kemampuan analisis yang lebih kuat terhadap fundamental suatu perusahaan maupun industri sehingga investor institusional mampu untuk memprediksi kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang dibandingkan dengan investor yang lainnya.

Kepemilikan institusional adalah proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan industri yang lain yang memiliki hubungan istimewa. Kepemilikan institusional juga mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen karena didalamnya investor institusional berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain :

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dalam perusahaan.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional dinyatakan dalam prosentase (%) yang diukur dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar (Desai dan Dharmapala, 2006).

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

#### 2.2.5 Dewan Komisaris Independen

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan yang lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan usaha. Pengertian terafiliasi sendiri merupakan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Dalam menjalankan wewenangnya, dewan komisaris haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tetap mempertahankan independensinya. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan

keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Berdasarkan keputusan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Tugas komisaris independen bersama dengan dewan komisaris, antara lain :

1. Bertanggungjawab dalam mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).
2. Memonitoring pelaksanaan *governance* dan melakukan perubahan jika diperlukan.
3. Memonitoring dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi, anggota dewan komisaris. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak pemegang saham (*fairness*).
4. Memantau keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan jelas.

Ukuran dewan komisaris independen dapat dihitung dengan :

$$DKI = \frac{\text{Komisaris Independen} \times 100\%}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

#### 2.2.6 Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor 29/PM/2004 yang telah disempurnakan oleh Kep-643/BL/2012, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan



Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Komite audit ini berfungsi sebagai pengawas internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses *Corporate Governance*. Sedangkan direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab atas pelaksanaan *Corporate Governance*.

Jumlah komite audit harus disesuaikan dengan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dan diketuai oleh komisaris independen dengan dua orang eksternal yang independen yang memiliki latar belakang keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. Independen disini artinya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama. Tugas dan fungsi dari komite audit antara lain :

- a. Membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- b. Menciptakan pengendalian yang dapat meminimalkan kesempatan dalam penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris ataupun Dewan Pengawas.
- d. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit ataupun eksternal audit.

Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, dapat membantu perusahaan untuk patuh terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Serta diharapkan dapat memberikan kontrol yang efektif dan efisien terhadap

benturan kepentingan dalam perusahaan. Ukuran komite audit dapat diukur dengan :

$$\text{KMA} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komite Audit Dari Luar}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komite Audit}}$$

### 2.2.7 Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *Corporate Governance* adalah kualitas audit yang erat kaitannya dengan prinsip akuntansi yaitu transparansi. Saat ini perusahaan publik menuntut adanya transparansi dan independensi dalam laporan keuangan yang menggambarkan tingkat kualitas yang dimiliki oleh seorang auditor. Profitabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka.

Kualitas audit merupakan segala bentuk kemungkinan yang timbul saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran yang terjadi, serta melaporkan dalam laporan keuangan auditan. Auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran dalam pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa sekaligus untuk dapat memenuhi kualitas audit, seorang auditor harus berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Ukuran yang digunakan dalam mengukur kualitas audit adalah dengan menggunakan ukuran KAP. KAP yang lebih besar dalam melaksanakan audit

akan lebih berkualitas dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan audit karena dianggap akurat serta efektif dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa sumber dipercaya lebih berkualitas dengan menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* cenderung memiliki tingkat kecurangan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan KAP *Non The Big Four*. Empat KAP *The Big Four* antara lain, *Price Waterhouse Cooper* (PWC), *Ernst & Young* (EY), *The Deloitte Touche Thomatsu*, dan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG). KAP yang termasuk kelompok *The Big Four*, antara lain :

1. *Ernst & Young* (EY), berafiliasi dengan Purwantono, Suherman & Surja.
2. *The Deloitte Touche Thomatsu* (Deloitte), berafiliasi dengan Osman Bing Satrio & Rekan.
3. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), berafiliasi dengan Sidharta Widjaja & Rekan.
4. *Price Waterhouse Cooper* (PWC), berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang mengindikasikan adanya masalah. Berikut ini akan diuraikan beberapa hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan penelitian terdahulu, yang menguji tentang

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi adanya *Tax Avoidance* dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Pengaruh ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dy Retta dan Mienati (2016) yang menyatakan bahwa, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan karena baik besar ataupun kecilnya suatu persentase kepemilikan saham, dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Dalam peranannya, kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mendisiplinkan, memantau, serta mempengaruhi keputusan dari pihak manajemen. Hal ini dibuktikan dengan semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat investor untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor dan tidak mementingkan kepentingan individual. Sehingga, kepemilikan institusional dapat menekan pihak manajemen dalam tindakan *Tax Avoidance*.

Adapun hasil penelitian yang mendukung adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* adalah penelitian dari Sabar Warsini (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan yang baik dalam mengawasi kegiatan manajemen. Maka dari itu, kepemilikan institusional merupakan mekanisme pengawasan yang kuat dan dapat meningkatkan *Corporate Governance* secara keseluruhan. Dan hal ini membuktikan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar, manajemen cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax*

*Avoidance*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*.

### **2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Rista dan IGK Agung (2016) yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara dewan komisaris independen dengan *Tax Avoidance*. Ini berarti bahwa keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Karena, pelaksanaan dari *Corporate Governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu dalam mengontrol dan mengendalikan pihak manajemen dalam melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *Tax Avoidance* menurun. Berdasarkan *agency theory* semakin banyak komisaris independen di dalam perusahaan maka akan semakin baik pula komisaris independen dalam melakukan *monitoring* dan *controlling* terhadap praktik manajemen yang memungkinkan pihak manajemen dalam memperoleh keuntungan pribadi. Secara aktif, komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta dapat mengurangi resiko seperti, rendahnya kepercayaan investor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* memiliki pengaruh yang besar pada perusahaan.

Adapun tambahan penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian dari Kesit Bambang (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris

independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan.

### 2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit dalam perusahaan memiliki peranan penting dalam membantu dewan komisaris menjalankan fungsinya secara menyeluruh dalam memberikan pengendalian bagi pihak manajemen. Komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab dalam mengawasi audit eksternal perusahaan dan juga berperan dalam memonitoring penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tentunya dengan melakukan pengawasan ini dapat mencegah pihak manajemen dalam melakukan kecurangan. Fungsi komite audit yang berjalan maksimal, dapat mengendalikan serta menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang baik pula. Keberadaan komite audit yang besar dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas dari *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Komite audit juga berfungsi dalam memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, pengendalian internal perusahaan, dan juga masalah yang timbul dalam akuntansi perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan peran dari komite audit dalam memberikan masukan mengenai praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dalam perusahaan, tentunya dengan mempertimbangkan peraturan perpajakan yang berlaku serta kebijakan yang ada, dan juga solusi yang tepat dalam menghindari risiko-risiko

yang muncul. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Putu Rista dan IGK Agung (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Trisna dan Ketut Alit (2016) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan maka akan meningkatkan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan. Sehingga akan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

#### **2.3.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance***

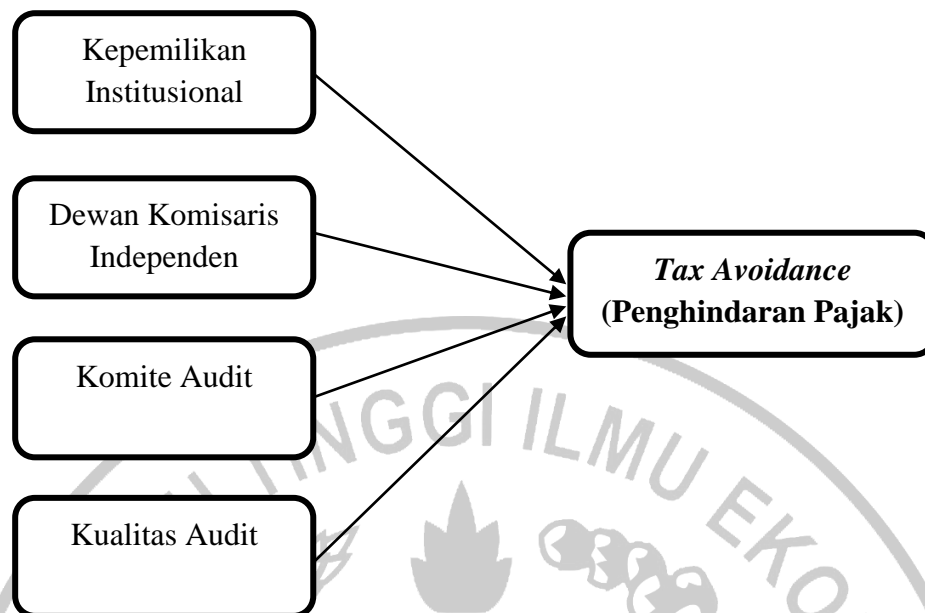
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014) yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kualitas audit terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Hal ini dinyatakan dengan, apabila suatu perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka akan semakin sulit dalam melaksanakan tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Tentunya KAP *The Big Four* memiliki pengetahuan dalam pendeteksian yang maksimal, serta pengetahuan dalam memeriksa laporan keuangan serta seluruh kegiatan dalam perusahaan. Dengan kapabilitas dan independensi yang dimiliki oleh auditor, maka auditor yang berkualitas akan mampu menemukan kecurangan dan mampu mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini juga didukung

oleh penelitian dari Sabar Warsini (2016) yang menyatakan bahwa auditor yang berkualitas tidak mengendaki manajemen perusahaan kliennya dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena jika auditor menghendaki tentunya akan muncul berbagai risiko. Semakin tingginya tingkat independensi auditor maka akan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, dengan meningkatnya kredibilitas dari laporan keuangan maka diharapkan akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Pengaruh tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kualitas audit yang baik dalam perusahaan akan mampu dalam membatasi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan hubungan variabel tersebut, maka terbentuklah kerangka pikir teoritis yang menggambarkan penelitian yang diteliti dan digambarkan sebagai berikut ini :





**Gambar 2.1**  
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Variabel tersebut yang akan diteliti apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H<sub>2</sub> : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H<sub>3</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H<sub>4</sub> : Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

